REKRUTMEN POLITIK CALON ANGGOTA LEGISLATIF
(STUDI : PADA DPC PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA)

Izzatul Ulya[1], Suryanef[2], Hasrul[3], Al Rafni[4]

[1,2,3,4]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : Izzatululya43111@gmail.com

ABSTRAK

Rekrutmen politik merupakan seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. rekrutmen partai persatuan pembangunan (PPP) di Kabupaten Dharmasraya merupakan fenomena yang popular terjadi. namun, terdapat kurangnya ketegasan dalam penyeleksian terhadap kandidat sehingga berdampak pada perkembangan dan kemajuan partai terutama dalam perekrutan anggota baru. tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan rekrutmen politik calon legislatif pada PPP dalam pemilu legislatif 2024 di Kabupaten Dharmasraya. jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap penarikan kesimpulan. hasil penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan rekrutmen caleg pada partai dilakukan dengan pola atau mekanisme rekrutmen terbuka, artinya siapa saja memiliki kesempatan yang sama untuk bergabung dengan PPP serta bersifat demokratis. Selain itu, rekrutmen oleh partai politik mencakup tiga tahapan penting yaitu penjaringan calon, penyaringan dan seleksi calon dan penetapan calon. Ketiga tahapan ini dijalankan secara berbeda-beda disetiap partai politik, akan tetapi pada PPP disesuaikan dengan platform dan aturan main yang ada di PPP atau dari partai politik yang bersangkutan.

Kata Kunci : *Rekrutmen Politik, Caleg PPP*

ABSTRACT

Political recruitment is the selection and appointment of a person or group to carry out a number of roles in the political system in general and government in particular. Recruitment of the United Development Party (PPP) in Dharmasraya Regency is a popular phenomenon. However, there is a lack of firmness in the selection of candidates so that it has an impact on the development and progress of the party, especially in recruiting new members. The purpose of this paper is to describe the political recruitment of legislative candidates at the PPP in the 2024 legislative elections in Dharmasraya Regency. This type of research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques using interview techniques and documentation studies. The data analysis technique uses the data reduction stage, the data presentation stage and the conclusion drawing stage. The results of this study found that the implementation of legislative candidate recruitment in the party was carried out with an open recruitment pattern or mechanism, meaning that anyone has the same opportunity to join the PPP and is democratic. In addition, recruitment by political parties includes three important stages, namely candidate selection, candidate screening and selection and candidate determination. These three stages are carried out differently in each political party, but in the PPP they are adjusted to the platform and rules of the game in the PPP or from the political party concerned.

Keywords : *Political Recruitment, PPP Legislative Candidates*

PENDAHULUAN

Rekrutmen merupakan salah satu fungsi yang dijalankan dengan mengadakan proses-proses seleksi penjaringan, rotasi dan mobilitas politik pada anggota masyarakat untuk penempatan jabatan baik legislatif maupun eksekutif berupa jabatan administratif maupun jabatan politis yang berdasarkan kemampuan, kinerja, bakat serta pengalaman dari anggota tersebut dengan memperhatikan faktor-faktor partisipasi dari sejumlah masyarakat.

Perekrutan adalah proses, cara, perbuatan merekrut, pemilihan dan pengangkatan orang untuk mengisi peran tertentu dalam sistem sosial berdasarkan sifat dan status seperti suku, kelahiran, kedudukan sosial dan prestasi atau kombinasi dari kesemuanya. Merekrut adalah mendaftar (memasukan) calon anggota baru. Perekrutan politik merupakan suatu proses melakukan pemilihan, pengangkatan dan penetapan, sehingga seseorang atau kelompok orang untuk jabatan politik dan pemerintahan. Semua partai politik melakukan proses perekrutan politik.

Namun, dalam implementasinya bahwa adanya perbedaan dalam prekrutmen anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yakni terdapat perbedaan yang mana biasanya partai memiliki ketentuan internal partai yaitu harus mengikuti proses pengkaderan minimal 1 tahun sebelum dilaksanakan pemilihan umum. Tetapi pada PPP tidak diberlakukan sistem pengkaderan melainkan perekrutan calon legislatif dilakukan dengan cara mengambil secara acak sesuai dengan keinginan dari pihak partai tanpa harus mengikuti proses pengkaderan yang telah ditentukan

Umumnya, terdapat tiga tahapan rekrutmen politik yang diterapkan secara berbeda-beda disetiap partai politik, akan tetapi disesuaikan dengan platform dan aturan main dari partai politik yang bersangkutan. Pada Partai Persatuan Pembangunan tiga tahapan yang digunakan yaitu tahap penjaringan, penyaringan dan seleksi serta tahap penetapan calon.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis dan akurat mengenai faktor-faktor atau hubungan antara fenomena yang diselidiki. Jenis penelitian kualitatif dekriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan suatu gejala berdasarkan fakta dan realita. jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu tahap reduksi data, tahap nyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan. Teknik analisis data ini digunakan untuk mengetahui proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan tangan, dan dokumentasi, sesuai dengan rekrutmen politik calon anggota legislatif pada PPP.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rekrutmen dalam partai politik sangat penting dilakukan agar calon legislatif yang didaftarkan bisa bersaing dan berhasil mendapatkan calon legislatif yang berkualitas dan bisa berpotensi mendapatkan kursi dilegislatif.

1. Tahap Penjaringan Calon

Penjaringan calon merupakan tahapan penyeleksian yang paling pertama dari proses seleksi partai terhadap bakal calon anggota legislatif dan juga pada tahapan ini merupakan bagian persyaratan administrasi dari internal partai. Pada proses penjaringan dan penyaringan calon yang dilakukan oleh partai politik memiliki mekanisme yang sangat variatif dan tergantung pada kebija0kan partai itu sendiri. Namun dalam beberapa indikator yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan caleg terdapat beberapa hal yang sama, seperti tingkat pendidikan, pengalaman berorganisasi, latar belakang sosial, partisipasi dalam partai politik, prestasi serta hal-hal yang terkait dengan kapabilitas,akseptabilitas serta popularitas dari pada caleg. Proses penjaringan calon internal partai juga dilaksanakan secara terbuka, karena partai juga di dalamnya akan menyeleksi kader-kader yang pantas untuk bisa lolos dan bisa menjadi calon pada partai tersebut termasuk sistem perekrutmen politik yang di lakukan oleh PPP.

2. Tahap Penyaringan dan Seleksi Calon yang Telah Di Jaring

Pada tahapan ini penyeleksian yang kedua dari proses seleksi partai terhadap bakal calon anggota legislatif, proses ini berlaku untuk seluruh bakal calon anggota legislatif dari PPP. Pada tahapan ini, PPP melakukan suatu terobosan untuk dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam memenangkan calon dari PPP. Pada tahapan ini strategi dari PPP yaitu lebih memperhatikan calon yang lebih dekat pada masyarakat, dan tentunya figur dari calon tersebut di sukai oleh masyarakat yang ada pada setiap dapil di Kabupaten Dharmasraya. Dan juga dalam penyaringan calon dan seleksi calon ini, internal partai PPP memberikan pemahaman tentang dasar negara, undang-undang, dan juga cinta akan tanah air, dan bisa di katakan internal partai PPP pada tahapan ini telah mengajarkan tentang pendidikan partai politik sesuai dengan ideologi yang ada pada partai tersebut.

Calon anggota legislatif yang sudah melaksanakan proses pendaftaran selanjutnya akan masuk ke tahap penyaringan, dalam tahap ini calon anggota legislatif harus mengikuti beberapa proses penyaringan. Pertama yaitu seleksi administratif, seleksi administratif terdiri dari semua berkas dokumen administratif yang disyarakan oleh internal Partai Persatuan Pembangunan dan undang-undang. Selanjutnya yang kedua yaitu tahap Fit and Proper Test. Bakal calon anggota legislatif yang dinyatakan lolos seleksi administratif diwajibkan mengikuti uji kompetensi berupa Fit and Proper Test yang diselenggarakan oleh DPC. Materi uji kompetensi meliputi; pengetahuan umum, keahlian dan Kepemimpinan, strategi pemenangan, dan ke PPP-an. Bagi calon anggota legislatif yang sudah lulus Fit and Proper Test, maka tahap selanjutnya yaitu proses keempat adalah uji publik dan penugasan. Setelah uji publik dan penugasan selesai, maka calon anggota legislatif akan dievaluasi kinerjanya oleh DPC. Selanjutnya Bakal caleg yang telah diseleksi oleh LPP wajib memenuhi kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Setelah melaksanakan seleksi maka diputuskan oleh tim seleksi independen caleg yang lolos seleksi dan langsung ditentukan. Sebanyak 20 orang bacaleg Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang lolos tahap penyaringan partai tersebut yang diselenggarakan oleh pengurus DPC PPP Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 21 September 2023. Pelaksanaan seleksi yang mereka jalankan yang dinilai memiliki kapasitas, intelektual, dan kompotensi yang baik lah yang lolos seleksi. Keputusan lolos atau tidaknya bacaleg menjadi caleg tergantung keputusan Tim Seleksi Independen.

3. Tahap Penetapan Calon

Penertapan Calon merupakan proses penetapan yang harus diikuti aturan yang sudah di tetapkan oleh PPP, dan khususnya PPP tidak membedabedakan jabatan atau kedudukan sebagai

calon anggota legislatif. Dan pada proses ini juga bisa di katakan banyak hambatan-hambatan yang terjadi dalam perekrutmen politik PPP, karena dan juga ini merupakan tahapan terakhir yang ada. Proses penetapan adalah hasil rapat partai yang sudah di putuskan bersama untuk menetapkan calon anggotanya.Ada beberapa proses penetapan untuk calon anggota legislatif Partai PPP di tahun 2024 dalam melakukan rekrutmen politik. Dan juga bisa ketahui bersama bahwa tahapan awal yang telah di lakukan oleh PPP yaitu: Proses penjaringan adalah tahapan penyeleksian yang paling pertama dari proses seleksi partai terhadap bakal calon anggota legislatif, Proses penyaringan adalah tahapan penyeleksian yang kedua dari proses seleksi partai terhadap bakal calon anggota legislatif. Dan dalam penetapan calon ini internal partai PPP akan melihat kualitas lebih untuk mendapatkan dan menempati nomor urut prioritas di dalam suatu daerah pemilihan. Contohnya ketua partai, sekretaris dan bendahara DPC Partai hanya mendapatkan hak untuk ditempatkan pada nomor prioritas dalam hal ini seluruh ketentuan di dalam penjaringan dan penyaringan dapat dipenuhi.

Proses penetapan harus mengikuti aturan yang sudah di tetapkan oleh partai PPP, dan khususnya Partai PPP tidak membeda-bedakan jabatan atau kedudukan sebagai calon anggota legislatif. Pada proses penetapan calon ini, internal partai PPP melakukan rekapitulasi dari beberapa tahapan sebelumnya yang di dalamnya menjadi tolak ukur untuk bisa menjadi calon legislatif dari internal partai PPP. Karena dalam menentukan calon harus benar – benar orang yang mempunyai intelektual yang tinggi dan juga berkualiatas, agar supaya masyarakat dapat melihat calon legislatif yang di utus oleh partai PPP benar –benar yang berkualitas dan memang pantas untuk di calonkan pada pemilihan umum legislatif pada 2024.

Setelah melalui tahap penyaringan, maka tahapan selanjutnya adalah tahap penetapan. Dalam tahapan ini calon anggota legislatif akan melewati beberapa proses sebelum resmi ditetapkan dalam daftar calon tetap. Proses pertama yaitu penyusunan dan penetapan daftar calon Sementara oleh KPU. Setelah itu ada proses pengajuan penggantian bakal calon anggota legislatif. Pengajuan penggantian bakal calon dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bakal calon pengganti disusun dan ditetapkan oleh partai setelah kelengkapan administrasi diproses oleh LPP PPP. Proses terakhir adalah penetapan daftar calon anggota legislatif tetap oleh KPU Kabupaten Dharmasraya.

Sebanyak 20 orang caleg Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang sudah ditetapkan lolos seleksi internal partai tersebut didaftarkan oleh pengurus DPC PPP Kabupaten Dharmasraya ke KPU Kabupaten Dharmasraya 3 November 2023. Pelaksanaan seleksi yang mereka jalankan yang dinilai memiliki kapasitas, intelektual, dan kompotensi yang baik lah yang lolos seleksi. Keputusan lolos atau tidaknya bacaleg menjadi caleg tergantung keputusan Tim Seleksi Independen.

Berdasarkan penjelasan keseluruhan maka dapat disimpulkan bahwa rekrutmen oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahapan penting yaituPenjaringan calon, tahapan ini mencakup interaksi antara elite partai di tingkat desa/kelurahan atau ranting partai dengan elite partai di tingkat atasnya atau anak cabang. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring, tahapan ini meliputi interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elite tingkat kabupaten/kota atau cabang/daerah. dan penetapan calon berikut nomor urutnya, tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang/daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang/daerah dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon legislatif.

Ketiga tahapan ini dijalankan secara berbeda-beda disetiap partai politik disesuaikan dengan platform dan aturan main dari partai politik yang bersangkutan. Akibatnya, derajat

demokratisasi partai politik turut menentukan kualitas calon kandidat. Adapun yang harus diperhatikan yaitu prinsip-prinsip dalam rekrutmen politik dalam melakukan rekrutmen seharusnya berpedoman pada sejumlah prinsip, ada delapan prinsip yang seharusnya menjadi rujukan sebagai berikut, pertama tidak pernah korupsi, dalam hal ini anggota, kader, dan pengurus partai politik merupakan politisi yang akan mewakili masyarakat, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Untuk itu, sedini mungkin mereka harus bebas dari perilaku tindakan tercela, baik yang melanggar norma sosial, agama maupun kepentingan publik. Untuk itu, partai politik perlu berupaya membersihkan organisasinya dari politisi tercela dan lebih memberikan kesempatan pada kader yang bersih atau tidak tercela dalam setiap proses rekrutmen.

Kedua, keterbukaan dalam hal transparansi atau keterbukaan merupakan prinsip yang perlu dianut dalam setiap proses rekrutmen terutama untuk pengurus dan pejabat publik. Prinsip transparansi yang dianut dalam hal ini mencakup banyak hal, di antaranya adalah mekanisme rekrutmen, profil politisi dan partai politik, serta kapasitas politisi baik dari sisi kualitas pendidikan maupun kemampuan ekonomi. Dari proses rekrutmen, keterbukan keuangan calon dan partai, dan profil calon.

Perlu diperhatikan tanggung jawab, Setidaknya dengan proses rekrutmen yang terbuka, partai politik membuka diri dalam hal mekanisme dan calon yang diseleksi kepada masyarakat, terutama kepada konstituennya. Dengan demikian partai politik akan berupaya menghadirkan individu-individu yang berkualitas, tidak hanya yang bermanfaat untuk membesarkan partai namun juga patut menurut masyarakat.

Meritokrasi Politik dalam hal rekrutmen pengurus partai dan pejabat publik, partai politik seharusnya mengenyampingkan mekanisme rekrutmen yang didasarkan atas kedekatan personal, termasuk kultural dan kekeluargaan. Idealnya, seleksi berdasarkan keahlian dan ikatan ideologi diawali dari rekrutmen anggota partai. Terlebih lagi untuk seleksi pengurus dan pejabat publik harus lebih didasarkan pada keahlian, kecakapan teknis, dan pengalaman berorganisasi. Proses rekrutmen diharapkan dapat menghasilkan politisi yang mumpuni dalam bidangbidang yang dibutuhkan oleh publik. Khusus untuk pejabat publik, rekrutmen perlu diarahkan un tuk mendapatkan sosok yang memiliki kepimpinan, berwawasan luas, dan pengetahuan teknis, minimal setingkat dengan pemahaman birokrasi.

Demokratisasi dalam proses rekrutmen diekspresikan sebagai perluasan partisipasi di dalam proses dimana ketika penyeleksi mengikuti perubahan metode seleksi kandidat lebih inklusi. Dan bisa juga dipertikan dari desentralisasi/otonomi dalam hal otoritas penentuan kandidat, seleksi caleg oleh pengurus partai di tingkat pusat dan tingkat daerah seharusnya dilakukan secara proporsional. Artinya, pengurus partai di daerah tidak dapat menyeleksi kandidat tanpa intervensi pimpinan pusat partai sama sekali. Begitu pula pimpinan pusat partai tidak seharusnya menentukan kandidat politisi tanpa ada pertimbangan dari anggota dan pengurus partai di tingkat daerah. Desentralisasi seleksi kandidat caleg oleh partai di daerah sangat penting sebagai upaya mem astikan elektabilitas calon di daerah.

Di samping itu, dengan memberikan otoritas kepada pengurus partai daerah, loyalitas dan kedekatan mereka terhadap partai akan terjaga. Sentralisasi penentuan kandidat memiliki sejumah kelemahan. Di antara kelemahan itu adalah pimpinan pusat seringkali menentukan aturan dan batas waktu yang membebani. Partai harus mempertimbangkan komposisi kader partai yang dicalonkan dalam lembaga legislatif terkait dengan statusnya sebagai incumbent, kader baru, perempuan, dan sebagainya.

KESIMPULAN

Mengenai rekrukmen politik Partai Persatuan Pembangunan pada calon legislatif di Kabupaten Dharmasraya, yakni Pelaksaan rekrutmen anggota partai dilakukan dengan rekrutmen terbuka artinya siapa saja memiliki kesempatan yang sama untuk bergabung dengan PPP serta bersifat demokratis. Pelaksanaan tersebut dilakukan melalui tiga tahapan rekrutmen, yaitu tahapan penjaringan, tahapan penyaringan dan seleksi serta tahapan penetapan calon. Tiga tahapan ini merupakan rangkaian yang dilakukan oleh PPP dalam proses rekrutmen politik caleg agar mendapatkan caleg yang berkualitas sehingga memiliki potensi kemenangan yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Aan Suryatwan, "Dinasti Politik pada Kepemimpinan Presiden Jokowi Akibat Kontestasi Politik Lokal Gibran-Bobby", Journal Publicuho, Vol. 3, No. 3, 2020.

Agustinus, Leo. Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Alfabeta, Bandung, 2014.

Arsyad Sanusi, "Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan", Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 2, 2009.

Atmadja, I Dewa Gede, Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum, Setara Press, Malang, 2015.

Budiardjo, Miriam., Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Cholisin, dkk. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Yogyakarta: UNY Press

Community, Green Mind, Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Total Media, Yogyakarta, 2009.

Fitriyah, "Partai Politik, Rekrutmen Politik, dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Jurnal Ilmu Politik, Vol. 11, No. 1, 2020.

Hazan, RY, & Rahat, G. 2010. Demokrasi dalam Partai: Metode Pemilihan Kandidat dan Konsekuensi Politiknya. OUP Oxford.Shidiq, Umar & Choiri, Miftachul. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan.* Ponorogo: CV Nata Karya.

Rizki, D. K. (2018). POLA REKRUTMEN PARTAI NASIONAL DEMOKRAT PADA PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2014 KABUPATEN JOMBANG.

Saputra, R. (2018). REKRUITMEN PARTAI POLITIK (Studi Pola Rekruitmen Partai Solidaritas Indonesia Terhadap Anak Muda).

Sugiyono. (2011). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. ALFABETA.

Surbakti, R. (1992). Memahami Ilmu Politik. PT Gramedia Jakarta.

Suyanto, B., & Sutinah. (2011). Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Google Books.

Taarama, D. F., Wilar Wiesje, & Rengkung, F. (2023). Pola Rekrutmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilihan Anggota Legislatif Kota Manado Tahun 2019. POLITICO: Jurnal Ilmu Politik, 11(4), 173–184.

Winda. (2023, September 12). PPP Targetkan Satu Kursi Per Dapil di Dharmasraya. Harianhaluan.Id. https://harianhaluan.id/politik/hh-57960/ppp-targetkan-satu-kursi-per-dapil-di-dharmasraya.